
IMPLEMENTASI PROGRAM SITUBONDO SEHAT GRATIS (SEHATI) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI KABUPATEN SITUBONDO

Ranum Widari Cantrika Bahtiar¹⁾, Dini Noor Aini²⁾
Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo
Email: ranumwidaricantrikabahtiar@gmail.com

Abstrak

Pelayanan dalam bidang kesehatan merupakan bentuk kongkret pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana hak kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Program SEHATI (Situbondo Sehat Gratis). Program Sehat memberikan pelayanan kesehatan gratis sesuai standar fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang bekerjasama. Implementasi Program Sehat berdasarkan pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis Di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Program Sehat serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Sehat. Lokus penelitian di RSUD Besuki dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Program Sehat di RSUD Besuki berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Terlihat dari komitmen pelaksana, sarana dan prasarana, penanganan pasien dan pengolahan data sesuai standar yang ditentukan. Peningkatan jumlah pasien Sehat juga menandakan Implementasi Program berjalan baik. Hambatan Implementasi Program Sehat di RSUD Besuki, kurangnya jumlah staf yang bertanggung jawab sebagai verifikator dan pelaksana Program, serta sosialisasi tidak melibatkan masyarakat umum sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Situbondo yang belum mengetahui tentang Program Sehat. Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* Program Sehat sebaiknya melakukan sosialisasi dengan selalu melibatkan *stakeholder* sampai di tingkat desa.

Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Implementasi, Program, SEHATI

Abstract

Health services are a concrete form of public service that the government is obligated to provide as part of fulfilling the basic needs of society. One of the efforts made by the Situbondo Regency Government is through the SEHATI Program (Situbondo Free Healthcare). This program provides free healthcare services in accordance with the standards of government-owned health facilities or partnered hospitals. The implementation of the SEHATI Program is based on Situbondo Regent Regulation No. 20 of 2021 concerning Guidelines for Funding

Healthcare Services within the Situbondo Free Healthcare Program in Situbondo Regency. This study aims to describe the implementation of the SEHATI Program and identify the supporting and inhibiting factors in its execution. The study was conducted at Besuki Regional Hospital using a descriptive qualitative method. The results indicate that the SEHATI Program at Besuki Hospital has been running well, adhering to policies and Standard Operating Procedures (SOPs). This is evident from the commitment of the program implementers, the availability of facilities and infrastructure, patient handling, and data management that meet the set standards. Additionally, the increasing number of patients utilizing the SEHATI Program is an indicator of its effective implementation. However, there are several obstacles in the implementation of the SEHATI Program at Besuki Hospital. These include a lack of staff responsible for verification and program execution, as well as suboptimal program socialization to the public. As a result, many residents in Situbondo Regency remain unaware of the SEHATI Program and its benefits. As a solution, the Health Office, as the primary sector managing the SEHATI Program, is advised to enhance socialization efforts by involving various stakeholders down to the village level. This is crucial to ensure that all residents understand and can benefit from the program to its fullest extent.

Keywords: Health Services, Implementation, Program, SEHATI

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan kependudukan terbesar yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah permasalahan kesehatan. Dampak dari permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh Bangsa Indonesia semata, namun permasalahan kesehatan ini telah menjadi isu Global. Masalah kesehatan masyarakat terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia didasarkan pada dua aspek utama yaitu, aspek fisik seperti sarana kesehatan dan pengobatan penyakit sedangkan yang kedua adalah aspek non fisik yang menyangkut masalah kesehatan. Pelayanan dalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk kongkret pelayanan publik. Pelayanan publik harus di laksanakan oleh pemerintah sebagaimana hak kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam masalah kesehatan.

Pemerintah sudah menyediakan jaminan kesehatan terpadu bagi masyarakat, yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu, Jamkesmas merupakan bagian dari BPJS PBI yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatan masyarakat terpenuhi. BPJS juga merupakan jaminan kesehatan dari pemerintah, merupakan lembaga yang mengelola program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS yang diterbitkan oleh BPJS terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang menjadi mendaftarkan dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri) ataupun kontribusi bersama pemberi kerjanya (sigmen atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayar oleh

pemerintah (segmen penerima bantuan iuran atau PBI).

Pemerintah daerah juga sudah menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu. Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo membuat kebijakan tentang program kesehatan gratis SEHATI (Situbondo Sehat Gratis), guna membantu masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di unit kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah bekerjasama, karena di Kabupaten Situbondo masih banyak masyarakat yang tergolong miskin yang belum terdaftar atau belum diintegrasikan ke dalam kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), masyarakat yang belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan apapun dapat terbantu dengan menggunakan Program Sehat tersebut.

Implementasi Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) didasarkan pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis Di Kabupaten Situbondo. Program Sehat merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP-elektronik bagi masyarakat miskin Situbondo agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang bekerjasama.

Sasaran Program Sehat adalah penduduk miskin yang memiliki KTP-elektronik Kabupaten Situbondo yang terdata atau yang tidak terdata dalam database DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta tidak mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan apapun atau dalam proses integrasi ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan yang memiliki kartu non aktif yang tidak terdata dalam DTKS tetapi merupakan penduduk miskin, Neonatus yang membutuhkan tindakan/rujukan setelah berumur 28 hari dan ibu nifas lebih dari 42 hari dari keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Santri dan anak-anak penghuni Panti Asuhan yang berada di Kabupaten Situbondo dan merupakan penduduk Kabupaten Situbondo.

Pembiayaan Program Sehat bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Situbondo, mencakup pelayanan kesehatan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat, pelayanan ambulance, obat dan bahan medis, penunjang diagnostik, transfusi darah, serta rawat sehari (*one day care*). Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di PUSKESMAS dibiayai sepenuhnya, dan pelayanan di RSUD dengan ketentuan perawatan di ruang kelas III dibiayai maksimal Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan di Rumah Sakit luar daerah dibiayai sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Unit kesehatan milik Pemerintah Daerah yang bekerja sama adalah PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Kabupaten Situbondo, RSUD Abdoer Rahem, RSUD Besuki, RSUD Asembagus dan Rumah Sakit luar daerah yang bekerja sama. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Sehat di RSUD Besuki, karena untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pengguna Program Sehat dan keberhasilan dari pelaksanaan Program Sehat tersebut. Maka dari itu penelitian ini membahas Implementasi Program Sehat di RSUD Besuki.

Program Sehati belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat umum di Kabupaten Situbondo, sehingga masih ada masyarakat yang tergolong miskin tidak memperoleh manfaat kesehatan dalam Program Sehati tersebut. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Selain masalah mengenai ketidaktahuan masyarakat mengenai Program Sehati karena kurangnya sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara umum, terdapat masalah lain yakni masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati pelayanan yang seharusnya menjadi hak, sehingga masyarakat saat ingin berobat selalu diresahkan dengan biaya yang akan dipungut oleh pihak pelayanan kesehatan, peserta masih dikenakan urun biaya dalam mendapatkan obat, alat medis habis pakai atau darah, penyediaan dan distribusi obat belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan obat pada Program Sehati. Dalam hal ini peneliti masih menemukan keluhan - keluhan lain berupa adanya uang jaminan yang diminta pihak rumah sakit kepada pasien pengguna Sehati.

Dilansir dari situs jatim.antaranews.com pasien pengguna Sehati mengeluhkan adanya uang jaminan yang diminta pihak rumah sakit kepada pasien pengguna Sehati. Uang jaminan yang diminta oleh pihak rumah sakit bervariasi, mulai dari satu juta rupiah hingga empat juta rupiah. Uang jaminan diminta pihak rumah sakit ketika pasien pulang di luar jam kerja atau di atas pukul 14:00 WIB. Keluarga pasien pengguna Sehati tidak sanggup karena dinilai terlalu tinggi. Bupati Situbondo Karna Suswandi menyangkan tindakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang masih meminta uang jaminan kepada pasien penerima manfaat Program Sehati. Permasalahan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021, yang seharusnya program pelayanan kesehatan tersebut gratis tanpa diminta uang jaminan apapun. **Rumusan masalah** penelitian ini adalah, 1] Bagaimana Implementasi Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki?, 2] Apa Saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki?. Tujuan dari penelitian ini adalah, 1] Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki. 2] Untuk Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki. **Tinjauan Pustaka**, 1] Konsep Administrasi Publik, meliputi implementasi kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha jumlah orang (Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus, dalam Pasolong, 2013:7). 2] Konsep Implementasi, merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Dengan pengertian sederhana ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Grindle, dalam Senain dan Fitriyah, 2018:75). Adapun model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dalam model yang dikembangkan Edward dijelaskan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Implementasi antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. 3] Pelayanan Kesehatan, pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan dalam terminologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terkait dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia pelayanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing (Pohan, 2007:28). 4] Konsep Program, kebijakan yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisi tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi kedalam program. Program yang bersifat operasional adalah program yang isinya mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan telah menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, kejelasan standar yang harus dipedomani. Ciri-ciri program: sasaran yang hendak akan dicapai, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, besarnya biaya yang diperlukan, jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut pandang kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan (Siagian, dalam Tachjan, 2006:33)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa data secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya untuk keperluan meneliti dengan dari segi prosesnya. Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan metode penelitian yang meliputi pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen (Moleong, 2009:9). Sumber Data, 1] Data Primer, Data primer dalam penelitian ini mencakup hasil wawancara dari Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama merupakan pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diangkat dalam penelitian. Informan pendukung yaitu merupakan orang

yang dapat memberikan informasi untuk membantu dalam pengecekan kembali keabsahan yang didapat dari informan pokok atau informan kunci (Suyanto dan Sutinah, 2005: 172). 2] Data Sekunder, Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang berbentuk dokumen dari instansi terkait dan dari sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, makalah, karya tulis ilmiah dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data, 1] Observasi, dalam penelitian ini menggunakan bentuk observasi partisipatif pasif. Observasi partisipatif membuat data yang diperoleh lebih lengkap, tajam dan mengetahui hingga tingkat makna setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2016:64). Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti peneliti melakukan setiap kegiatan program dan peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. 2] Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Jadi, metode wawancara ini merupakan sebuah metode mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan (Moleong, 2018: 186). 3] Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018: 240).

Teknik Analisis Data, 1] Pengumpulan data, peneliti mencoba menganalisis, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa. Salah satunya adalah dengan melihat konsistensi pernyataan informan saat dilakukannya wawancara dan membuang atau menggabungkan data dan fakta yang bersifat duplikatif dari hasil wawancara antara informan yang ada. Sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik serta diverifikasi oleh peneliti. 2] Reduksi data, pada tahap ini peneliti memilah, menyederhanakan dan memfokuskan data mentah dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang didapat dari lokasi penelitian. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara. 3] Penyajian data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, dimaksudkan agar lebih mempermudah untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. 4] Penarikan kesimpulan atau verifikasi, pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kembali dari data yang disajikan kemudian menarik kesimpulan dari tahapan sebelumnya. Penarikan kesimpulan merupakan sebuah kegiatan menginterpretasikan data yang sudah disajikan. Data yang disajikan berupa data matang yang telah diverifikasi dengan teori yang berkaitan dengan triangulasi sehingga data yang diperoleh lengkap dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program SEHATI (Situbondo Sehat Gratis) merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo yaitu Drs. H. Karna Suswandi, M.M yang bertujuan

memberikan pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP-elektronik untuk masyarakat miskin Situbondo yang belum terdaftar atau belum diintegrasikan ke dalam kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang bekerjasama. Tujuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 terdapat dalam Bab II Pasal 3, Program Sehati bertujuan untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Situbondo, memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan kendali mutu dan kendali biaya, pengelolaan alokasi anggaran pelayanan kesehatan bagi penduduk di Kabupaten Situbondo yang transparan dan akuntabel. Sasaran Program Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 terdapat dalam Bab III Pasal 5, sasaran penerima Program Sehati adalah penduduk miskin yang memiliki KTP-elektronik Kabupaten Situbondo yang terdata atau yang tidak terdata dalam database DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta tidak mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan apapun atau dalam proses integrasi ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan yang memiliki kartu non aktif yang tidak terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tetapi merupakan penduduk miskin, Neonatus yang membutuhkan tindakan/rujukan setelah berumur 28 hari dan ibu nifas lebih dari 42 hari dari keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Santri dan anak-anak penghuni panti asuhan yang berada di Kabupaten Situbondo dan merupakan penduduk Kabupaten Situbondo.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam Program Sehati meliputi: a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas dan jaringannya; b. pelayanan rawat inap tingkat pertama di puskesmas/Puskesmas rawat inap jiwa; c. pelayanan tingkat lanjutan di RSUD dan rumah sakit luar daerah yang bekerja sama; d. pelayanan rujukan dari RSUD ke rumah sakit luar Daerah yang melakukan kerjasama; e. pelayanan kegawatdaruratan di UGD Puskesmas dan/atau IGD RSUD/rumah sakit luar daerah yang bekerja sama; f. pelayanan ambulance; g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; h. pelayanan penunjang diagnostik; i. pelayanan transfusi darah; dan j. pelayanan rawat sehari (*one day care*). Adanya Program Sehati tersebut, guna membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Situbondo untuk menggunakan fasilitas kesehatan dan memperoleh manfaat Program Kesehatan secara gratis. Berikut data jumlah pasien berdasarkan tempat layanan yang menggunakan Program Sehati di RSUD Besuki tahun 2022 sampai 2023 terdiri dari dua jenis layanan, yaitu pasien rawat inap dan pasien rawat jalan, sebagai berikut :

Tabel Jumlah pasien Sehati RSUD Besuki tahun 2022-2023

Pasien Sehati Tahun 2022		Pasien Sehati 2023	
Rawat Inap	1.672	Rawat Inap	1.050
Rawat Jalan	1.230	Rawat Jalan	2.334
Jumlah	2.902	Jumlah	3.384

Tabel diatas menunjukkan bahwa pasien pengguna Sehati berdasarkan tempat layanan berobat rawat inap dan rawat jalan di RSUD Besuki mengalami

peningkatan, dilihat dari tahun 2022 yang mencapai 2.902 orang menjadi 3.384 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tergolong miskin yang belum terdaftar atau belum diintegrasikan ke dalam kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dapat terbantu dengan adanya Program Sehati tersebut.

Implementasi Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI) Di RSUD Besuki

Dimensi Komunikasi, Penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah Daerah melalui spanduk atau baliho dan juga informasi terlebih dahulu disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sebagai *leading sector*, setelah itu Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait Program Sehati ke Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Situbondo dan kepada seluruh unit pelayanan kesehatan yang bekerjasama salah satunya yaitu RSUD Besuki, penyampaian tentang bagaimana prosedur dan kejelasan pelaksanaan Program tersebut. RSUD Besuki sebagai perpanjangan tangan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tetap berupaya melakukan penyampaian isi terkait Program Sehati tersebut kepada masyarakat melalui bantuan dari staf pelaksana Sehati di RSUD Besuki. Selain itu staf pelaksana Sehati juga menyampaikan secara langsung kepada pasien pada saat melakukan pendaftaran di Rumah Sakit dan juga menginformasikan Program Sehati melalui sosial media RSUD Besuki yang ada. Selain komunikasi penyampaian informasi terkait Program Sehati kepada masyarakat, komunikasi antara aparat pelaksana program harus terjalin dengan baik supaya Implementasi Program Sehati berjalan sesuai yang diharapkan. Komunikasi aparat pelaksana Program Sehati baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan RSUD Besuki harus berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan verifikator Sehati yaitu Ibu Nur Aini, sebagai berikut: “Komunikasi antara pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sangat baik karena sudah ada perwakilan dari pihak Dinas Kesehatan sebagai staf verifikator yang ditempatkan di rumah sakit, jadi apabila ada masalah bisa cepat di atasi dengan langsung konfirmasi ke Dinas Kesehatan melalui verifikator.” (Hasil wawancara, 22 Maret 2024)

Dimensi Sumber Daya, 1] Sumber daya manusia, berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, dapat diketahui bahwasannya terdapat kekurangan dalam aspek ketersediaan staf yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Sehati. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Program Sehati di RSUD Besuki masih terdapat hambatan yaitu masih terbatasnya staf yang tersedia, hanya terdiri dari dua staf, verifikator dan pelaksana. Kekurangan staf dalam pelaksanaan program tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam proses administrasi dan klaim data pasien yang akan menggunakan Sehati. Seperti yang disampaikan masyarakat pengguna Sehati yaitu Bapak Rosi, sebagai berikut: “Jumlah staf yang bertanggungjawab pada Program Sehati di RSUD Besuki harus ditingkatkan, karena dapat menghambat proses pada saat mau mengurus administrasi dimalam hari, staf penanggungjawab Sehati sudah pulang. Jadi harus menunggu keeseokan harinya untuk mengurus.” (Hasil wawancara, 8 Mei 2024). 2] Fasilitas dan sumber daya anggaran, fasilitas dalam pelaksanaan Program Sehati adalah fasilitas unit kesehatan yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan dana anggaran Sehati yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sebagai pemegang anggaran dan penanggungjawab Program Sehati. Pembiayaan Program Sehati sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis Di Kabupaten Situbondo terdapat pada Bab V Pasal 20 ayat 3 yang menjelaskan Pelayanan Kesehatan dalam Program SEHATI di RSUD dalam daerah dibiayai sebesar maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). 3] Sumber daya informasi dan kewenangan, Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam Implementasi Kebijakan. Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Informasi terkait pelaksanaan Program sehati sudah di jelaskan dalam Peraturan Bupati Situbondo nomor 20 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan dalam Program Situbondo Sehat Gratis di Kabupaten Situbondo dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Program Sehati. Dalam hasil penelitian melalui observasi di lapangan, sumber informasi sudah sangat jelas dan di mengerti oleh pihak pelaksana program tersebut.

Selain sumber daya informasi, kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan dari para pelaksana Program Sehati sangat mempengaruhi Implementasi Program tersebut. Berikut hasil wawancara terkait kewenangan dari para pelaksana Program Sehati, seperti yang disampaikan Ibu Dewi, staf bidang SDK (Sumber daya Kesehatan) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, sebagai berikut: “Dinas Kesehatan ini sebagai pemegang anggaran dan penanggungjawab Program Sehati, kalau Rumah Sakit itu pelayanannya, pasien dilayani di Rumah Sakit, setelah Rumah Sakit melakukan pelayanan, Rumah Sakit klaim ke kita, nanti kita verifikasi semua berkas pasien, kalau semua sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baru kita bayar untuk klaimnya.” (Hasil wawancara, 30 Mei 2024)

Dimensi Disposisi, sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan Kebijakan Publik. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana, apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem yang di nilai pembuat kebijakan, maka Implementasi Kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sikap aparat pelaksana sudah baik karena sudah mengikuti peraturan yang ada dalam memberikan pelayanan. Dukungan terhadap suatu kebijakan yang di implementasikan juga sangat penting, agar program yang dijalankan berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang telah dibuat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh staf bidang SDK (Sumber daya Kesehatan) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yaitu Ibu Dewi, sebagai berikut: “Kami sangat mendukung, karena Program ini untuk masyarakat miskin yang tidak punya

jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Program ini juga sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kami sebagai pengampu di Dinas Kesehatan sangat mendukung.” (Hasil wawancara, 30 Mei 2024)

Dimensi Struktur Birokrasi, Keterpaduan komponen pelaksana kebijakan sangat diperlukan demi keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian, keterpaduan komponen-komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Program Sehati yaitu RSUD Besuki sebagai pemberi pelayanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sebagai pemegang anggaran dan penanggungjawab Program sehati, Dinas Sosial sebagai instansi yang akan mengeluarkan suket DTKS kepada masyarakat yang tidak mampu dan Pemerintah Daerah dari tingkat Kecamatan sampai Desa pembagian kewenangan sudah dilakukan dengan baik. Pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari aparat terkait harus sesuai dengan peraturan yang ada. Komunikasi juga harus tetap dijaga dengan baik supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Struktur Birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan Program Sehati sudah tersedia dengan baik oleh aparat terkait. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten hingga ke level yang paling rendah yaitu Pemerintah Daerah. Ketersediaan kelembangan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan Kebijakan Program Sehati. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sehati Di RSUD Besuki

Faktor Pendukung, 1] Komitmen, kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana Kebijakan berperan penting untuk mewujudkan Implementasi Kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana Kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam ketentuan program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini Implementor Program Sehati RSUD Besuki, sebagai berikut: “Komitmen kami yaitu melakukan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada, RSUD Besuki akan terus berupaya memberikan yang terbaik dan akan lebih luas menyalurkan informasi terkait program-program pelayanan kesehatan pemerintah kepada masyarakat.” 2] Sinergitas antar *stakeholders*, pelaksanaan Program Sehati tidak hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab Unit Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Situbondo, salah satunya yaitu RSUD Besuki sebagai pelaksana Program tersebut serta pemberi layanan. Kedua lembaga ini memiliki fungsinya masing-masing, dan keduanya dalam hal-hal tertentu mampu bersinergi dalam menjalankan Program Kebijakan tersebut. Tentu hal ini juga perlu mendapat

dukungan dari masyarakat agar segala upaya yang dilaksanakan dapat berhasil. Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Program tersebut sangat diperlukan, sebab masyarakat adalah objek sekaligus subjek. Masyarakat adalah sasaran dalam program tersebut. Masyarakat harus sadar akan pentingnya kesehatan, biaya bukan menjadi alasan lagi untuk berobat di unit kesehatan yang disediakan pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait program kesehatan gratis untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya adalah Program Sehati, melalui Program tersebut masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Situbondo bisa melakukan pengobatan di unit pelayanan kesehatan secara gratis.

Faktor Penghambat, 1] Sosialisasi tidak melibatkan masyarakat secara umum, berdasarkan hasil observasi dilapangan pada saat melakukan wawancara, peneliti melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo tidak melibatkan masyarakat secara umum. Hal ini menyebabkan masyarakat di Kabupaten Situbondo masih ada yang belum memahami sepenuhnya terkait Kebijakan Program Sehati, baik itu dari tujuan, manfaat dan sasaran Program Sehati dan masih ada masyarakat yang berobat di rumah sakit masih belum betul-betul memahami tentang Program Sehati. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tentang Implementasi Program Sehati di Kabupaten Situbondo dinyatakan bahwa setiap komponen pelaksana kebijakan harus mengetahui manfaat dari program tersebut dan melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat secara langsung dan jelas. Sehingga sasaran dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Program Sehati tersebut. 2] Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia), berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dalam Implementasi Program Sehati di RSUD Besuki masih terdapat hambatan yaitu masih terbatasnya jumlah staf yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan Program Sehati di RSUD Besuki, dimana tugas pokok dan fungsi dalam Implementasi Program tersebut merupakan tanggung jawab dari bidang Penunjang Medis dan Non Medis dalam unit RMIK (Rekam Medis dan Informasi Kesehatan), yang terdiri dari satu orang sebagai pelaksana yang bertugas menerima berkas awal pasien, dan pengecekan berkas-berkas pasien dan terdapat satu verifikator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang ditempatkan di RSUD Besuki bertugas untuk klaim berkas pasien. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, pelaksanaan Program Sehati tersebut tidak akan dapat berjalan pada proses Implementasi dengan baik. Penyelenggara kebijakan kesehatan harus menjadi salah satu prioritas penting dan urusan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sebab sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksana suatu kebijakan merupakan titik urgen untuk mencapai arah kebijakan sesuai yang ingin diharapkan.

KESIMPULAN

Implementasi Program Sehati di RSUD Besuki Kabupaten Situbondo jika dilihat dari aspek-aspek diatas dapat disimpulkan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Aspek yang belum terlaksana secara optimal adalah aspek sumber daya manusia, menunjukkan sumber daya manusia yang kurang

memadai dimana hanya terdiri dari pelaksana dan verifikator dan masih bercampurnya tugas dan fungsi antara verifikator dan pelaksana Sehati di RSUD Besuki yang menghambat proses administrasi. Sumber daya Dana dan anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sarana dan prasarana sudah mencukupi dan mendukung pelaksanaan Program Sehati. Sedangkan aspek Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah terlaksana secara optimal.

Hambatan dalam Implementasi Program Sehati di RSUD Besuki diantaranya, 1] Sosialisasi tidak melibatkan masyarakat secara umum, Dimana melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwasannya dalam Implementasi Program Sehati belum dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Situbondo, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan aparat pelaksana tidak melibatkan masyarakat secara umum. 2] Keterbatasan SDM, kurangnya sumber daya manusia para aparat pelaksana dalam mengimplementasikan Program Sehati di RSUD Besuki, yang terdiri dari satu orang pelaksana Sehati yang bertugas menerima berkas awal pasien, dan pengecekan berkas-berkas pasien dan satu verifikator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo bertugas klaim berkas pasien Sehati di RSUD Besuki. Kekurangan jumlah SDM dapat menghambat proses administrasi pasien Sehati di RSUD Besuki.

Faktor pendukung dalam Implementasi Program Sehati di RSUD Besuki diantaranya, 1] Komitmen dan tanggung jawab dari pelaksana kebijakan sudah cukup baik dengan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan mengikuti tugas pokok dan fungsinya selaku bidang yang menaungi masalah kesejahteraan masyarakat dalam hal ini masalah kesehatan masyarakat. 2] Sinergitas antar *stakeholders*, pelaksanaan Program Sehati tidak hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab Unit Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Situbondo, salah satunya yaitu RSUD Besuki sebagai pelaksana Program tersebut serta pemberi layanan. Kedua lembaga ini memiliki fungsinya masing-masing, dan keduanya dalam hal-hal tertentu mampu bersinergi dalam menjalankan Program Kebijakan tersebut.

Saran, 1] Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo melakukan sosialisasi dengan selalu melibatkan *stakeholders*, seperti Puskesmas, aparat Desa, Kecamatan dan masyarakat secara umum supaya masyarakat di Kabupaten Situbondo dapat memahami sepenuhnya terkait Kebijakan Program Sehati, baik itu dari tujuan, manfaat dan sasaran Program Sehati. 2] Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo memadai dan menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Program Sehati, guna mendukung Implementasi Program Sehati supaya lebih terlaksana dengan baik dan optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah

-
- menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Dr. Vita Novianti, SP, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
 6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terimakasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
 7. Rumah Sakit Umum Daerah Besuki selaku unit pelayanan kesehatan yang sudah bersedia menerima peneliti melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah.
 8. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sebagai instansi pemerintah yang sudah bersedia menerima peneliti melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah.
 9. Keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan.

REFERENSI

Buku

- Harbani, P. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Moelong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pohan Imbalo. 2007. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan*: Jakarta: EGC.
- Senain, & Fitriyah, N. S. 2018. *Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Jurnal

- Albertin. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.
- Yessica. (2013). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta. Universitas Diponegoro.

Dokumen lain

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis di Kabupaten Situbondo.

Antara Jatim. 2022. Rumah Sakit Daerah Minta Uang jaminan Pasien Program SehatGratis.[online].<https://jatim.antaranews.com/berita/582909/bupati-situbondo-sayangkan-rumah-sakit-daerah-minta-uang-jaminan-pasien-program-sehati>. [diakses pada Rabu, 9 Maret 2022 pukul 6:04]